

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada studi gender, yang mengangkat kasus mengenai dinamika keterwakilan Perempuan untuk mencapai posisi tertinggi di parlemen Australia. Berangkat dari adanya partisipasi Perempuan pertama di sepanjang Sejarah kepemimpinan sebagai seorang perdana Menteri. Terpilihnya Julia Gillard dari Partai Buruh Australia (ALP) sebagai perdana Menteri ke-27 berhasil mengangkat isu gender yang ada di Australia. Hal ini banyak merubah pandangan Perempuan yang sebelumnya tidak berkesempatan menjadi pemimpin di Australia akhirnya dapat dipatahkan oleh keterwakilannya sebagai seorang perdana menteri Perempuan. Namun kepemimpinan Julia Gillard ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik dari dalam negeri maupun luar negeri serta ia juga dikalahkan dalam tantangan kepemimpinan di bulan juni 2013 oleh Kevin Rudd yang pada akhirnya membuat Gillard mengakhiri karirnya dan mengumumkan bahwa ia pensiun permanen dari politik Australia. Setelah kepemimpinan Perempuan pertama pada tahun 2010 tidak ada keterwakilan Perempuan kembali sebagai perdana Menteri di Australia sampai dengan sekarang.

Australia merupakan hasil perpaduan istimewa antara adat istiadat kuno dan pengaruh kontemporer. Keunikan Australia kini tidak hanya terletak pada keragaman budayanya, tetapi juga pada sejauh mana masyarakatnya terikat oleh komitmen yang sama terhadap Australia. Secara umum Australia adalah Masyarakat egalitarianisme, yang mana ciri utama doktrin egaliter adalah gagasan bahwa semua manusia adalah setara dalam nilai dasar atau status moral. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) telah diratifikasi oleh Australia pada tanggal 28 juli 1983 dan dideklarasikan pada tanggal 30 Agustus 2000 (Syafri, 2015). Perjanjian ini dianggap sebagai Piagam Hak Internasional untuk perempuan yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1979 dan mulai di berlakukan pada tahun 1981.

Negara-negara penandatangan perjanjian CEDAW diwajibkan oleh hukum untuk menjamin kesetaraan atau partisipasi yang setara bagi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil. Pada pasal 7 CEDAW mengatur tentang hak perempuan untuk memilih, mencalonkan diri dalam pemilu, terlibat dalam perumusan kebijakan pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam organisasi non-pemerintah dan badan-badan lain yang peduli dengan kehidupan publik dan politik suatu negara seperti partai politik dan kelompok lobi. Selain itu dijelaskan dalam pasal 4 CEDAW menetapkan bahwa untuk mempercepat pencapaian kesetaraan, negara-negara diperbolehkan mengambil tindakan khusus sementara yang berpihak pada perempuan dengan dasar bahwa tindakan tersebut dirancang untuk mempercepat pencapaian kesetaraan. Oleh karena itu, sejak menjadi anggota dalam CEDAW, Australia telah mengembangkan banyak mekanisme untuk mengimplementasikan hak-hak yang tercantum dalam perjanjian ini.

The Sex Discrimination Act (SDA) adalah undang-undang federal yang menjadikan diskriminasi jenis kelamin melanggar hukum. SDA disahkan pada tahun 1984 dan dikelola oleh komisi Hak Asasi Manusia Australia sebagai salah satu mekanisme dalam mencapai kesetaraan. Sistem peradilan pidana, sistem hukum dan berbagai macam kebijakan dan program, serta sikap budaya juga merupakan bagian penting dalam mengimplementasikan dan menegakkan hak-hak yang tercantum dalam CEDAW (women's Human Rights). Upaya pemerintah nasional untuk memajukan kesetaraan gender dan menerapkan prinsip-prinsip kovenan ini ke dalam praktik melalui berbagai undang-undang dan kebijakan dimungkinkan oleh ratifikasi Australia atas berbagai perjanjian internasional tentang masalah ini. Penting untuk diingat bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin masih merupakan jenis diskriminasi yang paling umum dan rumit di Australia. Bergerak menuju kesetaraan gender yang lebih besar di Australia penuh dengan kesulitan dan masalah. Hal ini terlihat dari beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk masalah kesenjangan gender dalam pekerjaan dan prospek kerja, kesenjangan gaji, masalah politik, dan isu-isu lainnya. Meskipun masih banyak peran yang tidak dapat dipegang oleh

perempuan, perempuan tidak lagi menjadi pengambil keputusan yang terpinggirkan di Australia saat ini.

Commonwealth Franchise Act 1902 merupakan undang-undang yang dikeluarkannya hak bagi perempuan untuk tetap menjadi wakil di tempat-tempat pemerintahan, sebagai hasil dari implementasi Partai Buruh Australia (ALP). Sejak 1902, peran perempuan dalam pemerintahan relatif sedikit. Perempuan telah lama memainkan peran politik dan baru mulai memegang jabatan di pemerintahan Australia, sebelum perempuan pertama di Australia benar-benar bergabung dengan pemerintahan politik, hal ini pun juga membutuhkan waktu empat tahun, namun hanya posisi pemilihan dengan sistem proporsional yang tunduk pada kuota perempuan di kursi pemerintahan. Pemerintah Australia awalnya tidak menegakkan kesetaraan gender di setiap bagian negara. Karena dirasa Australia memarginalkan peran perempuan dalam politik pemerintahan. Salah satu partai besar yang menguasai pemerintahan Australia yaitu Partai Buruh telah mengembangkan sistem kuota politik pemerintah untuk perempuan.

Partai Buruh Australia (ALP) setuju untuk menerapkan kebijakan tindakan afirmatif pada tahun 1981, yang mengharuskan perempuan menduduki 30% jabatan di dalam partai. ALP menerapkan kembali kuota 35% untuk kandidat pada pemilu tahun 1994. Dari 14,5% pada pemilu tahun 1994 meningkat menjadi 35% pada pemilu 2010 untuk persentase kandidat perempuan yang berhasil memenangkan pemilu. Selain itu ALP juga menerapkan program pelatihan, mentoring dan pengukuhan jaringan perempuan pada *ALP's National Labor Women's Network*. Orientasi kebijakan partai buruh yang lebih sensitif gender ini akan mendorong kesetaraan gender dalam parlemen Australia (McCann, 2012). Komitmen partai buruh dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam parlemen juga terlihat pada kuota gender partai sebagai anggota parlemen perempuan hingga 40 persen. Partai buruh berupaya untuk menetapkan target 50 persen perwakilan perempuan dalam parlemen pada 2025 (Crowe,2018).

Terbentuknya kuota Perempuan melalui perundang-undangan

merupakan berita baik untuk kaum Perempuan. Dengan adanya sistem kuota membuat peluang Perempuan untuk mendapatkan hak-haknya, dapat menyampaikan masalah-masalah Perempuan dan mengawal kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan Perempuan. Hal ini secara langsung memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan aktif dan memperoleh kedudukan yang setara dengan laki-laki. Namun aktor-aktor perempuan ini belum mampu mengambil peran yang lebih signifikan, seperti perdana menteri. Perdebatan tentang perempuan dalam kepemimpinan terus berlanjut, bahkan di Australia. Diskusi seputar kepemimpinan perempuan benar-benar dipicu oleh sejumlah masalah, salah satunya adalah kurangnya penelitian empiris yang melaporkan hasil kepemimpinan perempuan di Australia dan sekitarnya.

Perempuan di Australia memiliki jumlah yang jauh lebih signifikan memegang peranan sebagai aktor di semua level layanan publik, termasuk politik pemerintahan Australia. Politik pada hakekatnya adalah upaya untuk merebut peran kekuasaan, termasuk akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan. Meskipun telah banyak perempuan di Australia yang memegang peranan sebagai aktor di semua level layanan publik serta sudah adanya pernyataan dari pemerintah Australia untuk memberikan dukungan sepenuhnya pada kepemimpinan perempuan namun kepemimpinan politik di Australia masih didominasi oleh laki-laki. salah satu penyebabnya adalah karena masih adanya anggapan bahwa kepemimpinan perempuan di Australia masih lebih buruk dibandingkan dengan kepemimpinan laki-laki.

Peran laki-laki yang bersuara dalam politik pemerintahan lebih mendominasi dibandingkan peran perempuan di Australia, sehingga menjadikan isu gender menjadi masalah dalam konteks ini. Ketika di dalam pemerintahan masih ada yang namanya dominasi tentu hal ini lebih banyak menguntungkan untuk pihak yang dominan. Maka dari itu dibutuhkan sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan, dalam hal ini ialah untuk melindungi hak-hak perempuan. Jika laki-laki dan

perempuan dibandingkan, terlihat bahwa laki-laki tetap memegang posisi otoritas tertinggi di Australia. Banyak kalangan beranggapan bahwa ketika seorang perempuan menjadi pemimpin, apalagi mewakili bangsa, ia akan terus memikul beban ganda yang sudah dipikul perempuan, yakni bekerja baik di dalam maupun di luar rumah. Perempuan masih dianggap belum dapat secara profesional memisahkan ruang pribadi dan ruang publiknya jika menjadi seorang pemimpin (Van Krieken, R., Habibis, D., Hutchins, B., Martin, G. and Maton, K. (n.d.), 2010). Berbeda dengan laki-laki, yang pada dasarnya memiliki lebih banyak tanggung jawab di tempat kerja daripada pekerjaan keluarga, perempuan lebih cenderung menghabiskan banyak waktu untuk tugas-tugas rumah tangga.

Seorang perempuan akan memiliki lebih banyak hambatan untuk diatasi sebelum dia bisa menjadi seorang pemimpin dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu kendala terbesar bagi seorang perempuan untuk sukses sebagai pemimpin, apalagi ketika menjadi seorang diplomat yang mewakili bangsanya di luar negeri, adalah fleksibilitas waktu. Di Australia, ada banyak pekerjaan yang tidak diperuntukkan bagi perempuan karena diyakini perempuan tidak memiliki jadwal yang lebih fleksibel daripada laki-laki. Selain itu, hal ini masih terkait dengan tugas rumah tangga yang harus dilakukan oleh seorang perempuan.

Upaya perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, serta realitas budaya yang memandang perempuan “sebelah mata”, merupakan isu yang sangat penting yang harus selalu diteliti dan dipertimbangkan. Paradigma sosial budaya yang muncul di masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi “nomor dua” karena kesehariannya berperan sebagai ibu yang mengurus anak dan sebagai istri yang menjadi pendamping hidup suami. Dengan pertimbangan demikian, seluruh pekerjaan perempuan dibatasi pada ranah rumah tangga/domestik, yang jelas sangat mempengaruhi sikap kaum perempuan. Realitas tersebut kian mengemuka bila kita mengamati perdebatan cukup sengit, khususnya dalam lingkungan akademik dan intelektual, tentang pro-kontra keterlibatan

Perempuan dalam dunia politik. Menurut Fakih, dalam tulisannya mengenai *“Sexism, Racism, and Canadian Nationalism”* bahwa Sebagian pihak memandang kiprah perempuan di ranah politik merupakan hak, tetapi di pihak lain ada yang menganggap derap kegiatan Perempuan di bidang politik merupakan sebuah upaya yang terlalu dipaksakan serta melanggar kodrat. Penting untuk ditekankan bahwa ketidaksetaraan gender sebenarnya merupakan cerminan dari norma-norma budaya yang ada dalam lingkup masyarakat yang lebih luas ketika berbicara tentang hambatan sosio-kultural dan struktural.

Partai politik di Australia masih memiliki kecenderungan untuk secara aktif mendukung politisi laki-laki. Dukungan oleh partai politik terhadap partisipasi Perempuan masih harus dipertanyakan. Sekuat apapun aturan dan regulasi yang berpihak pada keterlibatan perempuan dalam politik, kurangnya dukungan dari partai politik tetap tidak akan mewujudkan partisipasi tersebut. Kesenjangan terhadap gender ini, perlu dieliminasi melalui upaya-upaya sistematis dan terprogram, terutama melalui produk-produk hukum yang mengaturnya. Diskursus antara peran domestik dan domain publik inilah yang diperbincangkan di berbagai kesempatan. Bahwa keterlibatan langsung perempuan dalam politik harus menjadi salah satu elemen penting bagi perubahan nasib kaum perempuan itu sendiri mengingat gagasan mengenai kesetaraan yang digaungkan sejak 1902.

Dalam parlemen Australia, perempuan cenderung dikesampingkan dalam hal banyaknya kuota. Fokus perhatian ketika Julia Gillard menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 2010 adalah statusnya sebagai perempuan lajang yang melahirkan anak. Hak-haknya sebagai perempuan bermoral dipertanyakan oleh beberapa sumber media. Politisi Van Acker mengatakan bahwa liputan media tentang politisi perempuan cenderung menyoroti aspek kehidupan pribadi mereka, seperti keluarga mereka, sementara mengesampingkan aktivitas politik yang menjadi nilai penting pemilihan umum. Dan masih banyak yang berpendapat ketika seorang laki-laki bekerja bahkan dalam dunia politik, dan mereka memiliki anak, hal tersebut tidak menjadi permasalahan yang kompleks karena pada dasarnya seorang laki-laki

adalah bekerja dan tidak memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus anak. Kesenjangan tersebut yang akan menjadi pembahasan tentang bagaimana keberlanjutan dari peran perempuan di Australia adalah sebagai pemotongan hak dalam kehidupan politik. Tidak hanya itu kandidat perempuan dalam parlemen sering menjadi sasaran dalam penggambaran media yang kontroversi terhadap ketidaksetaraan gender khususnya perempuan. Terlepas dari kenyataan bahwa Australia telah mengeluarkan deklarasi yang sangat mendukung Kesetaraan.

Studi dari University of South Australia mengungkapkan bahwa kesetaraan dan keterwakilan Perempuan di Australia tidak proporsional. Pemerintah didesak untuk memikirkan kembali pendekatan mereka terhadap target gender (Carol T. Kulik, Shruti R. Sardeshmukh, 2023). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah Australia tidak mengarah pada peningkatan yang diharapkan dalam kesetaraan gender bagi Perempuan dalam kepemimpinan. Meneliti efek target gender dalam layanan public Australia, peneliti menemukan bahwa Ketika target gender di berlakukan, mereka tidak selalu mencapai hasil, yang diinginkan. Di Australia, Perempuan hanya menempati 19% CEO, dan kurang dari sepertiga sekitar 32% posisi manajemen kunci. Di sektor publik Australia, Perempuan mewakili 60 persen tenaga kerja, namun memegang kurang dari setengah peran paling senior. Peneliti utama Jill Gould dari UniSA mengatakan bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar memiliki target gender untuk meningkatkan kesetaraan Perempuan dalam peran senior di Australia (Jenihansen, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : “Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan perempuan dalam mencapai posisi tertinggi di parlemen Australia ?”

1.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.3.1 Gender dan Politik

Teori gender dan politik adalah pendekatan dalam ilmu politik yang mempertimbangkan konsep gender sebagai faktor kunci dalam membentuk dan mempengaruhi dinamika politik. Teori ini menekankan pentingnya memahami peran gender dalam pembentukan kebijakan, proses politik dan struktur kekuasaan. Teori gender dan politik menyelidiki bagaimana norma-norma, peran dan ekspektasi gender mempengaruhi tindakan politik, keputusan kebijakan dan partisipasi politik (Suharnanik S, 2023). Judith Butler adalah salah satu tokoh utama dalam teori gender dan politik. Buku “Gender Trouble” yang ditulisnya, diterbitkan pada tahun 1990, menggagas pandangan yang kontroversial tentang identitas gender, performativitas gender dan konsep bahwa gender bukanlah sesuatu yang terikat pada identitas biologis, tetapi dibentuk melalui Tindakan dan representasi sosial. Buku ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang gender dalam politik Masyarakat.

Gender memiliki pengaruh dalam struktur sosial yang dapat dilihat dalam budaya pada suatu masyarakat, realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender banyak terjadi dan ditemui pada perempuan sebagai suatu bentuk ketimpangan gender seperti adanya kekerasan, beban ganda dalam bekerja, adanya subordinasi hingga *stereotype*. Istilah gender pertama sekali diperkenalkan oleh Robert Hellen dalam Rasyidin ia memisahkan fitur manusia berdasarkan pada definisi sosial budaya dan manusia yang bertakrif pada karakteristik fisik biologis. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ann Oakley (1972), ia mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial atau karakter yang dipergunakan pada manusia untuk dibangun oleh kebudayaan manusia itu sendiri. Menurut pernyataan Oakley (1972) menyatakan bahwa gender adalah perbedaan pada manusia yang bukan biologis dan bukan kodrat ilahi. Gender adalah perbedaan perilaku antara kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara

sosial. Gender tidak harus dipertanyakan seandainya tidak terjadi lagi diskriminasi, ketidakadilan, sub ordinasi maupun ketimpangan peran laki-laki dengan perempuan di dalam masyarakat.

Hal inilah yang terjadi pada keterwakilan Perempuan di Australia, karena dirasa Australia memarginalkan peran perempuan dalam politik pemerintahan. Sejak 1902, peran perempuan dalam pemerintahan relatif sedikit. Perempuan telah lama memainkan peran politik dan baru mulai memegang jabatan di pemerintahan Australia, sebelum perempuan pertama di Australia benar-benar bergabung dengan pemerintahan politik, hal ini pun juga membutuhkan waktu empat tahun dan masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Banyak kalangan beranggapan bahwa ketika seorang perempuan menjadi pemimpin, apalagi mewakili bangsa, ia akan terus memikul beban ganda yang sudah dipikul perempuan, yakni bekerja baik di dalam maupun di luar rumah. Perempuan masih dianggap belum dapat secara profesional memisahkan ruang pribadi dan ruang publiknya jika menjadi seorang pemimpin (Van Krieken, R., Habibis, D., Hutchins, B., Martin, G. and Maton, K. (n.d.), 2010). Berbeda dengan laki-laki, yang pada dasarnya memiliki lebih banyak tanggung jawab di tempat kerja daripada pekerjaan keluarga, perempuan lebih cenderung menghabiskan banyak waktu untuk tugas-tugas rumah tangga.

1.3.2 Representasi Politik Perempuan

Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Perwakilan juga diartikan sebagai hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan yang terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai Tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili, yang ditulis dalam tulisan Alfred de Grazio yang

membahas mengenai teori perwakilan politik.

Keterwakilan kaum perempuan dalam politik merupakan bentuk implementasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan *atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan terlepas dari status perkawinan mereka di semua bidang baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi ini mendorong diberlakukannya perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan merubah praktek-praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotype untuk perempuan dan laki-laki.

Representasi Perempuan berarti keterwakilan Perempuan melalui wakil-wakil yang dipilih melalui mekanisme yang sesuai guna memilih eksekutif dan legislative. Perlu digaris bawahi bahwa keterwakilan Perempuan bukan hanya sebatas pada keterwakilan jenis kelamin Perempuan di tingkat tertentu, namun juga ditinjau keterwakilan dari isu-isu yang berhubungan dengan hak Perempuan. Di Australia keterwakilan Perempuan di berbagai sektor layanan publik memiliki jumlah yang jauh lebih signifikan memegang peranan, termasuk politik pemerintahan Australia. Meskipun telah banyak perempuan di Australia yang memegang peranan sebagai aktor di semua level layanan publik serta sudah adanya pernyataan dari pemerintah Australia untuk memberikan dukungan sepenuhnya pada kepemimpinan perempuan namun keterwakilan perempuan untuk mencapai posisi penting di parlemen Australia masih mendapati Hambatan.

Hambatan-hambatan dalam keterwakilan perempuan dapat dilihat dari : Pertama, kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya. Meskipun partai-partai besar di Australia seperti partai buruh dan partai

liberal telah menetapkan target kuota untuk perempuan dalam partai politik, pemerintah Australia sendiri belum menerapkan kuota tersebut di dalam parlemen. Hal ini terjadi disebabkan oleh Budaya politik di Australia yang cenderung menghargai atribut maskulinitas seperti keberanian, agresivitas dan retorika yang tegas. Selain itu pengenalan kuota gender sering kali memicu kontroversi dan oposisi dari beberapa politik. Kedua, dilihat dari budaya masyarakat yang ada di Australia. Budaya patriarki, stereotip gender, diskriminasi, minimnya dukungan merupakan faktor-faktor yang menjadi hambatan untuk perempuan mencapai posisi tertinggi di parlemen Australia. Senator Partai Hijau Sarah Hanson-Young adalah salah satu anggota parlemen federal yang telah membicarakan mengenai pelecehan terhadap dirinya secara terbuka. Peristiwa tersebut terjadi di dalam parlemen tahun 2018 yang mana ia diserang dengan perkataan seksis saat memperdebatkan tentang keamanan perempuan di dalam ruang politik (Mao, 2019).

Hambatan partisipasi perempuan yang ketiga yaitu banyaknya perempuan yang mengundurkan diri dari perpolitikan di Australia yang disebabkan oleh adanya pelecehan, kekerasan dan penguntitan. Dalam tulisan Lukas Coch (2021) "*The missing Women of Australian Politics – research shows the toll of harassment, abuse and stalking*" meneliti mengenai dampak kekerasan terhadap perempuan dalam politik terhadap kemajuan kepemimpinan politik perempuan di Australia mendapati bahwa banyak perempuan yang seharusnya memiliki kepemimpinan politik dan seharusnya menduduki posisi berpengaruh, namun tidak diberi kesempatan untuk melakukannya. (Coch, 21)

1.4 Hipotesa

Berlandaskan pada kerangka pemikiran dan untuk menjawab rumusan masalah Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan perempuan dalam mencapai posisi tertinggi di parlemen Australia :

1. Keterwakilan politik Perempuan kurang mendapatkan dukungan oleh

berbagai pihak, serta Tindakan afirmatif yang nyata untuk mengentas kesenjangan terhadap gender belum berjalan maksimal, mengingat pemerintah Australia belum secara resmi menetapkan peraturan mengenai kebijakan kuota untuk perempuan di parlemen Australia. Sedangkan pemenuhan kuota Perempuan di Australia hanya terjadi di dalam masing-masing partai politik dan tidak semua partai politik menetapkan kebijakan yang sama.

2. Keterwakilan Perempuan di Australia mengalami hambatan peningkatan keterwakilan yang disebabkan karena adanya stereotip gender, struktur partai yang masih didominasi oleh laki-laki, serta budaya politik yang mendukung status quo gender. Faktor tersebut masih menjadi penghambat yang signifikan untuk perempuan dalam mencapai posisi tertinggi di parlemen Australia.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengeksplorasi dan memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterwakilan Perempuan di parlemen.
2. Mencari tahu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesetaraan dalam politik melalui analisis perjalanan karier perempuan politisi yang berhasil mencapai posisi tertinggi di Parlemen Australia.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterwakilan Perempuan sebagai perdana Menteri di Australia, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan didukung oleh data yang bersumber dari data sekunder. Adapun, data-data tersebut berasal dari website resmi seperti AustralianPolitics.com, portal berita resmi, buku, jurnal dan tesis mengenai keterwakilan Perempuan di Australia.

1.7 Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menetapkan batasan tulisan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 agar tidak menyimpang dari pembahasan.

1.8 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi 4 bab yang kemudian akan saling berkaitan. Adapun keempat bab tersebut ditulis dengan sistematika berikut :

BAB 1 Berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, hipotesis, tujuan penelitian , metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. Dalam latar belakang akan menjelaskan mengenai keterwakilan Perempuan di Australia, dan juga menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi dinamika mewujudkan kepemimpinan Perempuan. Dalam rumusan masalah menanyakan mengenai faktor yang mempengaruhi perempuan dalam mencapai posisi tertinggi di parlemen Australia. Landasan teori menggunakan teori Gender dan Politik, serta representasi politik perempuan yang akan membantu untuk menjelaskan bagaimana gender sangat mempengaruhi perwujudan kepemimpinan Perempuan. Tujuan penelitian berisikan mengenai tujuan penulis yang ingin Mengeksplorasi dan memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterwakilan Perempuan di parlemen serta mencari tahu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencapai kesetaraan dalam politik. Metodologi yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif dengan dukungan data-data sekunder dengan Batasan tahun 2007-2022.

BAB 2 Menjelaskan mengenai Representasi Perempuan di pemerintahan Australia untuk melihat apakah implementasi kebijakan pemenuhan kuota Perempuan dalam partai politik sejalan dengan realitas keterlibatan Perempuan di Australia. Dalam bab ini melihat Partisipasi perempuan di Parlemen Australia apakah mengalami perkembangan besar atau tidak.

BAB 3 Dalam bab sebelumnya telah dituliskan mengenai representasi Perempuan di pemerintahan Australia. Oleh karena itu, dalam bab III ini didapat jawaban mengenai “Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perjuangan perempuan dalam mencapai posisi tertinggi di parlemen Australia ?” yaitu disebabkan oleh Keterwakilan politik

Perempuan kurang mendapatkan dukungan oleh berbagai pihak serta Keterwakilan Perempuan di Australia mengalami hambatan peningkatan keterwakilan yang disebabkan karena adanya stereotip gender, struktur partai yang masih didominasi oleh laki-laki, serta budaya politik yang mendukung status quo gender.

BAB 4 melalui data yang diperoleh dari bab sebelumnya maka terdapat kesimpulan serta saran yaitu bahwa terdapat faktor penghambat dalam keterlibatan perempuan di parlemen Australia meskipun Australia sudah berkomitmen untuk meningkatkan representasi perempuan dengan upaya penerapan kuota yang diterapkan oleh partai politiknya namun realitas yang terjadi hambatan perempuan untuk mencapai posisi tertinggi terus terjadi.